SALINAN SURAT

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL**

6 September 2000

Nomor : 2668/D/T/2000

Lampiran : -

Perihal : **Pembukaan program studi baru dan**

 **pendirian perguruan tinggi baru.**

Kepada Yth.

Rektor Universitas/Institut Negeri

Ketua Sekolah Tinggi Negeri

Direktur Politeknik Negeri

Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII

Kami sampaikan dengan hormat bahwa akhir-akhir ini cukup banyak keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai lambatnya layanan terhadap PTN dan PTS, khususnya kelambatan dalam penerbitan ijin pembukaan program studi baru maupun perguruan tinggi baru. Keluhan tersebut diungkapkan baik melalui media cetak maupun secara langsung kepada kami dalam berbagai forum atau pertemuan. Keluhan lain yang sering diungkapkan adalah ketidakadilan perlakuan antara PTN dan PTS dalam pemberian ijin penyelenggaraan suatu program.

Sehubungan dengan hal di atas dan untuk dapat meningkatkan layanan Ditjen Dikti kepada PTN dan PTS, khususnya dalam hal pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru, kami mohon perhatian pimpinan PTN dan PTS akan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tercatat angka pengangguran yang cukup tinggi untuk lulusan perguruan tinggi:

Tingkat Pendidikan

Penganggur 1997 1998 1999

 --------------------------------------------------------------------

Diploma I/II 37.676 47.380 90.230

Diploma III 104.054 128.037 153.696

Sarjana 236.352 254.111 310.947

---------------------------------------------------------------------

2. Jumlah PTS per Desember 1999 adalah 1558 (sebagian besar berbentuk akademi dan sekolah tinggi) dengan jumlah program studi sebesar 6517, dan dalam tahun 1999 meluluskan 230.915 orang. Lokasi dengan populasiPTS terbesar berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

3. Produksi PTN (menurut data September 1999) dalam tahun 1999 adalah 277.289 lulusan program diploma dan 78.045 lulusan program sarjana (termasuk disini lulusan Universitas Terbuka). Dominasi lulusan PTN adalah pada bidang ilmu sosial dan bidang kependidikan.

4. Dengan memperhatikan keadaan pada 3 butir di atas, maka diperlukan suatu upaya konsolidasi untuk sementara membatasi pertumbuhan program studi baru maupun perguruan tinggi baru. Upaya konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan lulusan perguruan tinggi yang menganggur dan menyesuaikan kemampuan lulusan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

5. Pencetakan lulusan perguruan tinggi secara terus menerus tanpa memperhatikan penyerapan lulusan di dunia kerja atau bahkan menciptakan lulusan yang menganggur merupakan suatu pemborosan.

6. Dalam upaya konsolidasi ini diharapkan agar setiap pimpinan PTN dan PTS dapat melakukan beberapa hal diantaranya :

a. Melakukan tracer study (studi pelacakan) untuk mengetahui secara pasti pekerjaan setiap lulusannya.

b. Melakukan relokasi sumber daya manusia yang ada agar kinerja lembaga menjadi lebih efisien. Relokasi tersebut dapat dilakukan melalui penggabungan jurusan/fakultas/perguruan tinggi, penutupan program studi yang sudah tidak layak, perubahan program studi ke arah kebutuhan nyata dunia kerja.

c. Melakukan koordinasi internal maupun eksternal, khususnya antar perguruan tinggi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sehingga tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat tetapi justru menumbuhkan suatu sinergi yang baik.

7. Dalam upaya konsolidasi ini, pembukaan program studi baru ataupun pendirian perguruan tinggi baru hanya dapat diproses apabila memenuhi kriteria tambahan (selain dari persyaratan akademik yang telah berlaku selama ini) sebagai berikut :

 a. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei).

 b. Kepastian bahwa dengan pembukaan program baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.

 c. Untuk menjamin tidak terjadinya over-supply lulusan, maka program studi yang diusulkan tersebut harus dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk ini diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya perguruan tinggi.

 d. Dalam pembukaan program studi baru hendaknya memperhatikan pula keadaan lingkungan yaitu keberadaan program studi perguruan tinggi lain di sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.

 e. Khusus untuk pendirian perguruan tinggi swasta baru diutamakan pada daerah (wilayah) yang sama sekali belum ada perguruan tinggi di sekitarnya sedangkan populasi penduduknya cukup padat. Untuk kota besar atau wilayah yang sudah mempunyai PTS cukup banyak, disarankan supaya ada upaya penggabungan (merger) dari beberapa PTS kecil menjadi suatu PTS yang besar sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Dengan upaya tersebut di atas, diharapkan konsolidasi penataan pendidikan tinggi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sekaligus meningkatkan layanan Ditjen Dikti kepada PTN dan PTS.

Semua pihak agar mempedomani hal-hal tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami sampaikan t erima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP. 130889802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)

2. Inspektur Jenderal Depdiknas

3. Sekretaris dan Direktur di Ditjen Dikti

4. Sekretaris DPT dan para Ketua Majelis dan KDI

1. Ketua Umum APTISI